

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GOWA




RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN
2024

 inspektorat_gowa

 gowainspektorat@gmail.com

 Jl. Tumanurung No.15, Sungguminasa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Tumanurung No. 15, Sungguminasa – 92111

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 06/SK/II/INSPEKTORAT/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026, perlu disusun rencana kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa;
- b. bahwa yang tersebut Namanya dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas dan tanggung jawab dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 dengan nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas sesuai arahan Inspektur Daerah;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal, 16 Januari 2023


**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN GOWA,**
H. ANDY AZIS, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19720902 199303 1 003

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Peringgal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024**
NOMOR : 06/SK/II/INSPEKTORAT/2023
TANGGAL : 16 JANUARI 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. ANDY AZIS, S.H., M.Si.	Inspektur Daerah	Penanggung Jawab
2	SYAHRUL SYAHRIR, ST	Sekretaris	Ketua Tim
3	ACHMAD SOFYAN, SE, MM	Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi	Wakil Ketua
4	SISWATI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris
5	FAUZIAH HASYIM, SE	Auditor Ahli Pertama	Anggota
6	MUTHMAINNAH, SH	Auditor Ahli Pertama	Anggota
7	ELVIRA YUNITASARI AKBAR, SH	Pelaksana	Anggota

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN GOWA.**
H. ANDY AZIS, SH, M.Si
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 197209021993031003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Kami mengharapkan Renja ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan. Namun disadari bahwa dalam penyusunan Renja untuk Tahun Anggaran 2024 masih membutuhkan koreksi, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan sehingga penyusunan Renja di masa mendatang dapat lebih disempurnakan, terima kasih.

Sungguminasa, 4 Juli 2023

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



H. ANDY AZIS SH., M.Si

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP : 19720902 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III	33
TUJUAN DAN SASARAN	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Pokok Renja	35
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV	45
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	45
BAB V	49
P E N U T U P	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa adalah bagian dari Pemerintah Kabupaten Gowa merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gowa. Dalam melaksanakan tugasnya, disusun perencanaan 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa 2021–2026, selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja wajib dilaksanakan bagi OPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Renja OPD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-OPD. Selanjutnya RKA-OPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026.
14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja disusun dengan maksud menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai

visi, misi dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Pokok Renja
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mempunyai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan yang diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD yang merupakan upaya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

VISI

Visi Pembangunan Kabupaten Gowa merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Gowa, substansi RPJM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan Pemerintah Gowa serta visi misi Bupati/Wakil Bupati.

Untuk visi pembangunan Inspektorat Daerah mengikut dengan Visi Pembangunan Kabupaten Gowa pada RPJMD 2021 - 2026, yaitu:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN
TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK**

MISI

Untuk mewujudkan Visi diatas, maka didukung dengan Misi yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif
- b. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi
- c. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan
- d. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah mempunyai keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Ke-Empat Pemerintah Kabupaten Gowa yaitu, **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”**, misi ini merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien dengan fokus sasaran Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran, secara umum tingkat pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	3	3	100
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Level	3	3	100

**sumber data: Laporan QA BPKP Perwakilan Sul-Sel*

Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan penyusunan Renja tahun 2024 yaitu :

- a. Melakukan penajaman sasaran program terutama yang berkaitan dengan ketertiban pada Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan penataan sasaran-sasaran strategis didalam kerangka tujuan strategis untuk tahun selanjutnya, sehingga dapat menunjukkan arah yang lebih jelas dalam menuntun setiap langkah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga Auditor melalui kegiatan diklat, pendidikan dan pelatihan.
- d. Mempertahankan pembinaan dan pendampingan terhadap OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hasil Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2023 dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan Renja 2023 dengan melakukan penyesuaian sesuai kondisi Tahun 2024 yang diperkirakan dengan capaian Tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, maka berikut ini hasil evaluasi kinerja tahun anggaran 2023:



Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” dengan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, yakni Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah

kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur terkait yaitu: Kapasitas, Kewenangan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Kapabilitas APIP yang memadai sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional masih menjadi impian bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 telah menargetkan Kapabilitas APIP di tahun 2022 berada pada level 3 dari skor level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional. Peningkatan kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IA-CM). Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam 5 level yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Penetapan level kapabilitas APIP dilakukan menggunakan hasil *self assessment* (penilaian mandiri) oleh Inspektorat dan kemudian divalidasi oleh Tim quality assurance (penjaminan kualitas) BPKP. Penilaian dilakukan atas 6 (enam) elemen yaitu peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola. Pada tahun 2023 target level kapabilitas APIP level 3, realisasi level 3 dengan capaian 100% atau dalam kategori Sangat Tinggi. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.03/LHE-695/PW21/6/2023 atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa telah berada di level 3 untuk semua elemen.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh 3 (tiga) program, yang terbagi atas 2 (dua) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang.

Tabel 2.2
Program dan Indikator Program Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Unit Kerja yang bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan/Aset yang Material
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja Program Korsupgah
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Program prioritas yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Persentase Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan/aset yang material

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gambaran atas kondisi keuangan maupun tolak ukur informasi dari sebuah pemerintah daerah. Banyak LKPD saat ini belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit LKPD.

Target	Realisasi	Capaian
95%	91%	96%

Persentase SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan/aset yang material diperoleh dari membandingkan antara jumlah SKPD yang memiliki temuan dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Gowa yang bersifat material dengan jumlah seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Fokus dari Pemeriksaan BPK yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 yang diterbitkan oleh BPK di tahun 2023, terdapat 5 (lima) SKPD dari 54 (lima puluh empat) SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang memiliki temuan bersifat material, diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal/Eksternal) Setiap Tahun Berkenaan

Penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional Pengawas (AFP), baik rekomendasi dari BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sendiri.

Target	Realisasi	Capaian
80%	51%	64%

Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal/Eksternal) diperoleh dari membandingkan antara jumlah tindak lanjut yang dilakukan dengan jumlah rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan AFP BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan AFP yang dilakukan.

Dari total 235 rekomendasi yang ada pada tahun 2023, Kabupaten Gowa mampu menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebanyak 121 rekomendasi. Berikut hasil tindak lanjut temuan pemeriksaan AFP tahun 2023.

Tabel 2.3.
Persentase Tindak Lanjut AFP Tahun 2023

NO	AFP	JUMLAH REKOMENDASI	JUMLAH TINDAK LANJUT	PERSENTASE
1	BPK	52	14	26.92
2	BPKP	-	-	-
3	Itjen	-	-	-
4	Itprov	34	17	50
5	Itkab	149	90	60.40
TOTAL		313	241	77.00

*Sumber : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

2) Persentase cakupan penyelesaian penanganan kasus pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pengaduan masyarakat adalah laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat. Adapun pengaduan yang dimaksud adalah bersumber dari lembaga negara, badan hukum, partai politik, organisasi masyarakat, media massa maupun perorangan.

Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

Persentase cakupan penyelesaian penanganan kasus pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperoleh dari membandingkan antara jumlah pengaduan yang masuk pada

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dengan cakupan penyelesaiannya.

Jumlah pengaduan yang masuk pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2023 sebanyak 4 (empat) pengaduan dari masyarakat. Dari Total 4 (empat) aduan yang masuk, APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mampu menindaklanjuti dalam bentuk audit untuk menyelesaikan semua kasus pengaduan tersebut.

3) Rata-rata Capaian SAKIP OPD

Setiap tahunnya, Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu Instansi Pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Target	Realisasi	Capaian
BB	BB	100%

Dari Total 54 OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, terdapat 15 (lima belas) OPD yang mendapat predikat A, 34 (tiga puluh empat) OPD yang mendapat predikat BB dan 5 (lima) OPD yang mendapat predikat B, sehingga rata-rata capaian SAKIP OPD Kabupaten berpredikat BB atau Sangat Baik.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1) Indeks RB pada Komponen Penguatan Pengawasan

Salah satu sasaran prioritas nasional dalam visi Indonesia Maju, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Sentul 14 Juli 2019, yaitu terwujudnya Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi mendorong setiap instansi pemerintah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indeks RB menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Terdapat 8 Komponen pada Indeks RB, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Target	Realisasi	Capaian
B	B	100%

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Nomor B/504/RB.06/2024 Tanggal 1 Februari 2024

oleh Kementerian PANRB, realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gowa adalah 67,31 dengan kategori "B".

2) Persentase Pemenuhan MCP

MCP atau *Monitoring Center for Prevention* merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan monitoring yang dilakukan oleh bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI. Dengan aplikasi ini, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi di daerah.

MCP sendiri meliputi 8 area intervensi yaitu, manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Target	Realisasi	Capaian
80%	63%	79%

Kabupaten Gowa sendiri memperoleh total capaian 79,05%, dengan capaian masing-masing intervensi yaitu area Perencanaan dan Penanggaran APBD dengan skor 47%, area Pengadaan Barang dan Jasa dengan skor 56%, area Perizinan dengan skor 85%, area Pengawasan APIP dengan skor 55%, area Manajemen ASN dengan skor 70%, area Optimalisasi Pajak Daerah dengan skor 91%, area Manajemen Aset Daerah 41%, dan area Tata Kelola Desa dengan skor 100%.

Secara umum PKPT tahun 2023 dilaksanakan dengan baik dengan realisasi 100 persen sesuai yang direncanakan, meskipun masih memiliki kendala yaitu kesiapan dari objek pemeriksaan, yang telah di jadwalkan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam PKPT tahun

2021, namun kendala tersebut tidak cukup berimplikasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Berdasarkan evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Gowa, maka Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dan capaian strategis di tahun 2024 sebagai upaya untuk mengantisipasi kendala yang berimplikasi pada capaian kinerja yang tidak optimal maka perlu dilakukan upaya-upaya kegiatan *consulting* serta *quality assurance* dengan mendorong pengembangan kemampuan dan pemahaman APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terkait *risk management* (manajemen risiko) dalam mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan mengikuti berbagai pelatihan *risk management*.

Selanjutnya kaitan antara realisasi program dan kegiatan Renja tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian target Renstra dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gowa

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6				tidak perlu diisi						
6	01									
6	01	01								
6	01	01	2.01							
6	01	01	2.01							
6	01	01	2.02							
6	01	01	2.02							
6	01	01	2.02							
6	01	01	2.05							
6	01	01	2.05							
6	01	01	2.06							
6	01	01	2.06							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
6	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Jenis		11 Jenis	11 Jenis	100	14 Paket	14 Paket	100
6	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Jenis		20 Jenis	20 Jenis	100	23 Paket	23 Paket	100
6	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16850 Lembar		16650 Lembar	16650 Lembar	100	3 Paket	3 Paket	100
6	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Buah		6 Buah	6 Buah	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
6	01	01	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Kali		14 Kali	14 Kali	100	14 Laporan	14 Laporan	100
6	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 336 Org - 12 kali		- 336 Orang - 12 kali	- 336 Orang - 12 kali	- 100 - 100	12 Laporan	12 Laporan	100
6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	30 Unit		26 Unit	26 Unit	100	26 Unit	26 Unit	100
6	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit		26 Unit	26 Unit	100	26 Unit	26 Unit	100
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia	2 Jaringan		2 Jaringan	2 Jaringan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Jaringan		2 Jaringan	2 Jaringan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	3 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	94	3 Jenis	3 Jenis	100
6	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100
6	01	01	2.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	80	1 Unit	1 Unit	100
6	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	32 Unit		30 Unit	30 Unit	100	30 Unit	30 Unit	100
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE UNIT KERJA YANG BERSIH DARI PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN/ASET YANG MATERIAL	97%		95%	95%	100	0,95	0,95	100
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Jenis Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	7 Jenis		7 Jenis	7 Jenis	100	7 Jenis	7 Jenis	100
6	01	02	2.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 LHP		12 LHP	12 LHP	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6	01	02	2.01	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 LHP		15 LHP	15 LHP	100	15 Laporan	15 Laporan	100
6	01	02	2.01	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 LHR		3 LHR	3 LHR	100	3 Laporan	3 Laporan	100
6	01	02	2.01	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	19 LHR		19 LHR	19 LHR	100	19 Laporan	19 Laporan	100
6	01	02	2.01	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 LHP		30 LHP	30 LHP	100	30 Laporan	30 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Relisasi Capaian s/d tahun 2023 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
6	01	02	2.01	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Perjanjian		2 Perjanjian	2 Perjanjian	100	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	100
6	01	02	2.01	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	75 Reko mendasi		75 Reko mendasi	75 Reko mendasi	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Jenis Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan	7 Jenis		7 Jenis	7 Jenis	100	7 Jenis	7 Jenis	100
6	01	02	2.02	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 SKTJM		-	-	-	-	-	-
6	01	02	2.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	55 LHP		52 LHP	52 LHP	100	52 Laporan	52 Laporan	100
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PEMENUHAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM KORSUPGAH	68%		65%	65%	100	0,65	0,65	100
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan dengan Program Pengawasan	92%		-	-	-	-	-	-
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Kebijakan		-	-	-	-	-	-
6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Kebijakan		-	-	-	-	-	-
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Assesment RB, Money PPK dan Hasil SPI	3 Lap		3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 Kali		2 Kali	2 Kali	100	54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	100
6	01	03	2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54 Unit Kerja		54 Unit Kerja	54 Unit Kerja	100	54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	100
6	01	03	2.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	9 Unit Kerja		9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
6	01	03	2.02	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Unit Kerja		-	-	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah melaksanakan sistem pengawasan intern Pemerintahan Kabupaten Gowa berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa serta seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Gowa. Ruang lingkup PKPT terdiri dari pemeriksaan (audit), monitoring, evaluasi dan reviu. Selain itu Inspektorat Daerah juga menetapkan kegiatan non PKPT untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan non PKPT antara lain terdiri dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah dan kepatuhan perundang-undangan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK RI serta pengawasan secara komprehensif.

Sampai dengan saat ini belum terdapat indikator kinerja yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum, namun untuk IKK telah diatur yakni itu Kapabilitas APIP. Selain itu, Inspektorat Daerah juga menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang secara umum merujuk pada Kementrian PAN dan RB, BPKP maupun APIP lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa terus berupaya meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan penilaian SAKIP Kabupaten Gowa menuju BB sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan s/d Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				2022	2023	2024	2022	2023	2023	2024	
1	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu Penting

1. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Good governance yang diterjemahkan sebagai tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan tema umum kajian yang populer, baik di pemerintahan, masyarakat maupun dunia swasta. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan dan seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik di negeri ini. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma "*rule government*" menjadi "*good governance*". Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menurut paradigma "*rule government*" senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma "*good governance*", dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam Intern birokrasi maupun di luar birokrasi yaitu publik (masyarakat).

Good governance menunjuk pada cara kekuasaan dan kewenangan yang digunakan. Tata pemerintahan dinilai baik ketika kekuasaan dikelola dan digunakan untuk merespon masalah-masalah publik dengan mengikuti prinsip dan nilai yang selama ini dinilai baik oleh masyarakat. Ketika kekuasaan digunakan dengan cara-cara yang melanggar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, suatu pemerintahan akan dinilai buruk. Tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good governance*. Sebaliknya,

tata pemerintahan yang buruk adalah sebuah tata pemerintahan yang diselenggarakan dengan mengabaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good governance* (Dwiayanto, dkk, 2003).

UNDP dalam Sedarmayanti (2003), menjelaskan bahwa ketiga domain *good governance* (negara, swasta, dan masyarakat) menuntut hubungan yang sinergis dan konstruktif serta saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, melalui penerapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip **good governance** sebagai berikut; **Participation**, yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. **Rule of law**, yaitu Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia. **Transparency**, yaitu dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau. **Responsiveness**, yaitu daya tanggap untuk senantiasa melayani setiap *stakeholders*. **Consensus orientation**, yaitu merupakan perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih baik, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. **Effectiveness** dan **efficiency**, yaitu proses yang RESPONSIF menghasilkan sesuai dengan yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. **Accountability**, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*. **Strategic vision**, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

2. Pencegahan Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Korupsi akan berakibat terhadap tidak tercapainya tujuan kegiatan yang direncanakan, korupsi dapat berdampak sangat luas jika dibiarkan. Kemiskinan akan bertambah, kerusakan hutan dan lingkungan, daya saing daerah menurun, kualitas pelayanan publik menjadi buruk. Korupsi telah merambah pada berbagai segmen maupun elemen pemerintahan, hal tersebut dapat dilihat dengan indikator masih banyaknya masalah hukum yang berproses di lembaga yang berkompeten. Potensi korupsi tidak hanya pada pemerintah pusat tetapi juga berada pada pemerintahan daerah terlebih lagi dengan adanya pelimpahan sebagian besar kewenangan pada pemerintahan daerah.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan akibat korupsi maka peran lembaga pengawasan Internal menjadi sangat vital dalam menjalankan fungsinya sebagai deteksi dini sebelum ataupun jika ada gejala korupsi yang akan berdampak lebih luas. Perkembangan pencegahan korupsi tidak hanya terfokus pada pengelolaan keuangan tetapi telah berkembang pada penyelenggaraan pelayanan publik.

Sumber Daya Inspektorat

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Inspektorat Kabupaten Gowa, disamping ditentukan oleh kemantapan sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengawasan, juga ditentukan oleh kualitas sumber daya aparat yang melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan. Keterampilan, profesionalisme, dan integritas yang dimiliki oleh aparat yang ada, secara signifikan akan menentukan kinerja pengawasan yang dilaksanakan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 didukung oleh 57 orang (data per 31 Des 2023) Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.6
Klasifikasi Jabatan/Eselon dan Umur Pegawai

NO	JABATAN/ ESELON	Pangkat / Golongan	TOTAL
1	Pembina Utama Muda	IV/c	2
2	Pembina Tingkat I	IV/b	11
3	Pembina	IV/a	3
4	Penata Tingkat I	III/d	17
5	Penata	III/c	10
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	10
7	Penata Muda	III/a	4
TOTAL			57

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Review terhadap rancangan awal RKPD serta usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gowa	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNJANG SKPD	100%	8.234.655.258	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gowa	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNJANG SKPD	100%	8.234.655.258	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	4 Dokumen	48.536.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	4 Dokumen	48.536.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	41.532.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	41.532.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.004.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.004.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Pengadministrasian Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu	13 Dokumen	6.545.628.954	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Pengadministrasian Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu	13 Dokumen	6.545.628.954	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gowa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ Bulan	6.252.666.554	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gowa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ Bulan	6.252.666.554	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	285.958.400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	285.958.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	7.004.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	7.004.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian	2 Jenis	565.544.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian	2 Jenis	565.544.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gowa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	114 Stel	124.900.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gowa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	114 Stel	124.900.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gowa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang	440.644.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gowa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang	440.644.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Operasional Administrasi yang Disediakan	7 Jenis	563.316.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Operasional Administrasi yang Disediakan	7 Jenis	563.316.300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gowa	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Paket	4.480.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gowa	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Paket	4.480.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gowa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	51.512.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gowa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	51.512.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gowa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	49.364.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gowa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	49.364.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gowa	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	17.572.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gowa	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	17.572.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	27.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	27.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	406.787.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	406.787.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	28 Unit	137.027.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	28 Unit	137.027.400	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gowa	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	28 Unit	137.027.400	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gowa	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	28 Unit	137.027.400	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia	2 Laporan	100.862.004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia	2 Laporan	100.862.004	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	100.862.004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	100.862.004	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	3 Jenis	273.740.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	3 Jenis	273.740.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gowa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	44.868.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gowa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	44.868.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gowa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	210.802.600	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gowa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	210.802.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gowa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	18.070.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gowa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	18.070.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Gowa	PERSENTASE UNIT KERJA YANG BERSIH DARI PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN/ASET YANG MATERIAL	95%	1.213.312.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Gowa	PERSENTASE UNIT KERJA YANG BERSIH DARI PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN/ASET YANG MATERIAL	95%	1.213.312.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	7 Jenis	858.932.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	7 Jenis	858.932.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	112.095.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	112.095.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	126.075.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	126.075.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	33.705.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	33.705.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	19 Laporan	239.755.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	19 Laporan	239.755.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pengawasan Desa	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	197.675.000	Pengawasan Desa	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	197.675.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Gowa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	8.855.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Gowa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	8.855.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	140.772.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	140.772.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan	7 Jenis	354.380.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gowa	Jumlah Jenis Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan	7 Jenis	354.380.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	50.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	50.000.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	52 Laporan	304.380.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	52 Laporan	304.380.000	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Gowa	Jumlah LHR Lap. Keuangan	67%	412.670.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Gowa	Jumlah LHR Lap. Keuangan	67%	412.670.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Gowa	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan dengan Program Pengawasan	90%	85.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Gowa	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan dengan Program Pengawasan	90%	85.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Gowa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	50.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Gowa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Gowa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	35.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Gowa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	35.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Assesment RB, Monev PPK dan Hasil SPI	3 Laporan	561.277.500	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Gowa	Jumlah Laporan Assesment RB, Monev PPK dan Hasil SPI	3 Laporan	561.277.500	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	54 Perangkat Daerah	103.395.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	54 Perangkat Daerah	103.395.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Gowa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54 Perangkat Daerah	56.175.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Gowa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54 Perangkat Daerah	56.175.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Gowa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	345.532.500	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Gowa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	345.532.500	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Gowa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	54 Perangkat Daerah	56.175.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Gowa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	54 Perangkat Daerah	56.175.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Gowa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM serta organisasi lainnya. Sehingga, sampai saat ini Inspektorat Daerah belum pernah mendapat usulan program atau kegiatan dari para stakeholder atau para pemangku kepentingan. Namun hal itu tidak serta merta mengurangi partisipasi masyarakat dalam ikut terlibat di program kerja yang Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa lakukan.

Pada Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah dijelaskan bahwa salah satu kegiatan yang menjadi urusan Kabupaten/Kota ialah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, selain itu pada Permendagri No. 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 telah disebutkan salah satu fokus pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah kepada Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah ialah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat. Sehingga kedua aturan ini telah membuka ruang dan mengakomodir kepentingan stakeholder untuk ikut berpartisipasi pada program kerja terkait pengawasan dengan cara masyarakat dapat mengajukan laporan atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus/kasus. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
					Tidak ada program atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah khususnya pada tugas-tugas bidang pengawasan/ pemeriksaan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Kabupaten Gowa merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Gowa, substansi RPJM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Gowa, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, Untuk Visi Pembangunan Kabupaten Gowa pada RPJMD 2021-2026 adalah:

Masyarakat yang Unggul dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif.

Masyarakat yang Tangguh dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.

Tata Kelola Pemerintahan Terbaik dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah mempunyai keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Ke-Empat Pemerintah Kabupaten Gowa yaitu, **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”**, misi ini merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan tata kelola pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten dilakukan antara lain oleh Inspektorat Kabupaten. Dalam PP No. 79 tahun 2005 diatur bahwa Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten.

Fungsi auditor internal tidak hanya sekedar mendeteksi kesalahan (*detective control*), melainkan juga untuk membantu mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (*preventive control*), serta mengarahkan atau mempertajam (*directive control*) aktivitas operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan. Auditor internal harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, serta mampu mendorong terciptanya *Good Governance*, pengelolaan risiko yang efektif, dan penciptaan lingkungan pengendalian yang memadai. Keberadaan para auditor merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan daerah karena mereka merupakan lini

terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan gugus terdepan sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Pokok Renja

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 ditujukan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Sedangkan sasaran penyusunan Rencana Kerja Inspektorat sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan arah dan pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) tahun 2024 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat. Untuk Renja Inspektorat Kabupaten telah mengacu pada Renstra Inspektorat dan RPJMD Kabupaten Gowa untuk Periode 2021-2026.

Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan misi dalam Renstra Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran strategis ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan Meningkatkan fungsi pengawasan

Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gowa untuk Tahun 2024 diselaraskan dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2. Kegiatan

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program penyelenggaraan pengawasan terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 2) Pendampingan dan Asistensi

3. Sub Kegiatan

- a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Reviu Laporan Kinerja
 - 4) Reviu Laporan Keuangan
 - 5) Pengawasan Desa
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- i. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- j. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 2) Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- k. Kegiatan pendampingan dan asistensi terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rumusan rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana	Catatan Penting
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNJANG SKPD	Kab. Gowa	100%	8.234.655.258	APBD	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kab. Gowa	4 Dokumen	48.536.000	APBD	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gowa	3 Dokumen	41.532.000	APBD	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gowa	1 Laporan	7.004.000	APBD	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu	Kab. Gowa	13 Dokumen	6.545.628.954	APBD	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gowa	57 Orang/ Bulan	6.252.666.554	APBD	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Gowa	9 Dokumen	285.958.400	APBD	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gowa	1 Dokumen	7.004.000	APBD	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian	Kab. Gowa	2 Jenis	565.544.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana	Catatan Penting
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Gowa	114 Stel	124.900.000	APBD	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gowa	57 Orang	440.644.000	APBD	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Operasional Administrasi yang Disediakan	Kab. Gowa	7 Jenis	563.316.300	APBD	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gowa	7 Paket	4.480.100	APBD	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gowa	14 Paket	51.512.000	APBD	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Gowa	23 Paket	49.364.800	APBD	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gowa	3 Paket	17.572.400	APBD	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gowa	6 Dokumen	6.000.000	APBD	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gowa	14 Laporan	27.600.000	APBD	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gowa	12 Laporan	406.787.000	APBD	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Kab. Gowa	28 Unit	137.027.400	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana	Catatan Penting
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	Kab. Gowa	28 Unit	137.027.400	APBD	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia	Kab. Gowa	2 Laporan	100.862.004	APBD	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gowa	2 Laporan	100.862.004	APBD	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Kab. Gowa	3 Jenis	273.740.600	APBD	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Gowa	5 Unit	44.868.000	APBD	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gowa	1 Unit	210.802.600	APBD	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Gowa	30 Unit	18.070.000	APBD	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE UNIT KERJA YANG BERSIH DARI PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN/ASET YANG MATERIAL	Kab. Gowa	95%	1.213.312.000	APBD	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Jenis Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	Kab. Gowa	7 Jenis	858.932.000	APBD	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	12 Laporan	112.095.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana	Catatan Penting
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gowa	15 Laporam	126.075.000	APBD	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Gowa	3 Laporan	33.705.000	APBD	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Gowa	19 Laporan	239.755.000	APBD	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Gowa	30 Laporan	197.675.000	APBD	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kab. Gowa	2 Kesepakatan	8.855.000	APBD	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Gowa	4 Dokumen	140.772.000	APBD	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Jenis Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan	Kab. Gowa	7 Jenis	354.380.000	APBD	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kab. Gowa	2 Laporan	50.000.000	APBD	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gowa	52 Laporan	304.380.000	APBD	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah LHR Lap. Keuangan	Kab. Gowa	67%	412.670.000	APBD	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan dengan Program Pengawasan	Kab. Gowa	90%	85.000.000	APBD	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Gowa	2 Rekomendasi	50.000.000	APBD	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Gowa	2 Rekomendasi	35.000.000	APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana	Catatan Penting
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Assesment RB, Monev PPK dan Hasil SPI	Kab. Gowa	3 Laporan	561.277.500	APBD	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gowa	54 Perangkat Daerah	103.395.000	APBD	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Gowa	54 Perangkat Daerah	56.175.000	APBD	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Gowa	3 Kegiatan	345.532.500	APBD	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Gowa	54 Perangkat Daerah	56.175.000	APBD	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyusunan Renja berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja.

Renja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Pendanaan indikatif untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada Renja tahun 2022 lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNJANG SKPD	100%	8.234.655.258
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	4 Dokumen	48.536.000
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	41.532.000
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.004.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Dokumen Pertanggungjawaban Tepat Waktu	13 Dokumen	6.545.628.954
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ Bulan	6.252.666.554
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	285.958.400
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	7.004.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian	2 Jenis	565.544.000
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	114 Stel	124.900.000
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang	440.644.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Operasional Administrasi yang Disediakan	7 Jenis	563.316.300
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7 Paket	4.480.100
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	51.512.000
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	49.364.800
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	17.572.400
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6.000.000
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	27.600.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	406.787.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	28 Unit	137.027.400
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	28 Unit	137.027.400
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia	2 Laporan	100.862.004
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	100.862.004
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Terpelihara	3 Jenis	273.740.600
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	44.868.000
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	210.802.600
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	18.070.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE UNIT KERJA YANG BERSIH DARI PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN/ASET YANG MATERIAL	95%	1.213.312.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Jenis Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	7 Jenis	858.932.000
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	112.095.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	126.075.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	33.705.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	19 Laporan	239.755.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	197.675.000
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	8.855.000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	140.772.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Jenis Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan	7 Jenis	354.380.000
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	50.000.000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	52 Laporan	304.380.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah LHR Lap. Keuangan	67%	412.670.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Capaian Program / Hasil Kegiatan / Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan dengan Program Pengawasan	90%	85.000.000
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	50.000.000
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	35.000.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Assesment RB, Monev PPK dan Hasil SPI	3 Laporan	561.277.500
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	54 Perangkat Daerah	103.395.000
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54 Perangkat Daerah	56.175.000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	345.532.500
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	54 Perangkat Daerah	56.175.000

BAB V

P E N U T U P

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Terwujudnya Renja OPD merupakan prasyarat bagi setiap OPD untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana strategis pada kurun waktu tertentu. Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024 ini sangat penting guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat untuk tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gowa Periode 2021-2026.

Kaidah kaidah pelaksanaan:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gowa berkewajiban memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2024;
3. Sekretaris dan Para Inspektur Pembantu Wilayah lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan target-target kinerja sasaran setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2024;
4. Para Kepala Sub Bagian membantu secara teknis Sekretaris dan Para Inspektur Pembantu Wilayah dalam pencapaian target kinerja dari setiap program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2024;
5. Staf membantu Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan program dan kegiatan masing-masing.

Perencanaan merupakan penentuan tujuan utama organisasi beserta cara-cara untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan juga

diartikan sebagai langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses manajemen agar sumber daya yang terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik dan didukung data yang andal akan memberikan hasil yang tidak terlalu jauh dari target keluaran yang direncanakan dengan catatan asumsi-asumsi dalam kebijakannya terpenuhi. Salah satu kelemahan penting yang sangat menonjol dalam perencanaan adalah seringnya diterbitkan regulasi-regulasi baru yang berpengaruh dalam proses kerja Inspektorat Kabupaten, pada sisi lain regulasi keuangan sangat kaku untuk meresponnya.

Untuk mendapatkan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra yang selanjutnya dijabarkan sebagai tujuan dan sasaran di dalam Renja secara optimal maka perlu sistem perencanaan yang matang, jelas dan realistis. Sehingga pelaksanaan program kerja dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, efektif dan efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap program kegiatan.

Selanjutnya bahwa Renja yang disusun ini jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.